



Media: Harian Jogja

Hari: Kamis

Tanggal: 23 April 2020

Halaman: 1



Jalur Alternatif...

Kepala Dishub DIY, Tavip Agus Rayanto, mengatakan sebelum kebijakan larangan mudik dari Pemerintah Pusat jajarannya sudah mendapatkan tugas dari Gubernur DIY untuk penindakan kepada para pemudik mulai Jumat (24/4). Dengan adanya kebijakan pelarangan, tentunya semakin memperkuat penindakan. Meski demikian, Pemda DIY menunggu aturan tertulis dari Pusat agar bisa menjadi payung hukum saat penindakan.

"Kami konsultasi dengan Biro Hukum, kalau hanya pernyataan Presiden itu belum bisa menjadi regulasi karena DIY belum menerapkan pembatasan sosial berskala besar [PSBB]," katanya Rabu (22/4).

Dishub DIY, menurut Tavip, sudah berkomunikasi dengan Kementerian Perhubungan soal aturan larangan mudik. Dia berharap pada Jumat sudah ada payung hukum. Tetapi jika regulasi dari

Pusat belum turun, Pemda DIY tetap melanjutkan penindakan dengan cara persuasif. "Mulai Jumat kami melakukan pemeriksaan selama tiga sif selama 24 jam, kalau sekarang kan baru satu sif, prinsipnya 24 jam tetapi ada istirahatnya," ucapnya.

Untuk mengantisipasi pemudik lewat jalur alternatif, Dishub menutup dua jalur alternatif yakni jalur Turi-Pakem yang berada di selatan Jembatan Krasak di dekat perbatasan Magelang dan jalur di Jalan Daendels Kulonprogo. Menurut Tavip, semua kendaraan harus melalui jalur utama. Untuk pengawasan jalan-jalan kecil diserahkan ke dinas perhubungan kabupaten/kota.

Dukung Kebijakan

Ketua Organda DIY, V. Hantoro, mengatakan jajarannya mendukung larangan mudik sebagai upaya mencegah penyebaran Covid-19. Ia

mengaku para pengusaha angkutan justru rugi lebih besar lagi jika Covid-19 tidak kunjung usai.

"Dampaknya bagi kami sangat besar. Tetapi yang jelas kami harus pikirkan dampak negatif ini, seimbang enggak dengan dampak yang diakibatkan Covid-19 yang tersebar lewat arus mudik? Kami harap ada dampak positif yang ditimbulkan dengan larangan mudik di Indonesia," kata Hantoro.

Organda DIY, menurut Hantoro, mendukung upaya pemerintah agar Covid-19 cepat selesai. Mengenai insentif, ia berharap jika ada alokasi maka jajarannya siap.

Di sektor penerbangan, Pelaksana Tugas Sementara GM Yogyakarta International Airport (YIA), Agus Pandu Purnama, mengatakan sebagai penyelenggara layanan publik apapun kebijakan pemerintah akan diikuti.

"Misal daerah tertentu *lockdown* maka di bandara tersebut akan

lockdown. Selama tidak ada, kami akan melayani," ucap Pandu.

Diakui Pandu selama pelayanan publik di bandara tersebut berjalan akan sulit membedakan orang yang melakukan perjalanan karena hal penting atau mudik. Oleh karena itu, peningkatan keamanan pencegahan Covid-19 sangat dibutuhkan.

"Kami mengantisipasi dengan pemeriksaan yang lebih ketat, terutama di terminal kedatangan. Untuk penumpang berangkat juga diperiksa. Pemeriksaan suhu dilakukan setiap ada penumpang," ucapnya.

Manager Humas PT KAI Daop 6, Eko Budiyo, mengatakan jajarannya siap mendukung imbauan terkait dengan larangan mudik. Bahkan sejumlah perjalanan kereta api baik lokal maupun jarak jauh sudah banyak yang dibatalkan. "Kami siap mengikuti aturan yang ada," ujar Eko.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 31 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005